

BAB IV

KOLABORASI NIKE DAN INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN KAUM BURUH PABRIKNYA DI INDONESIA

Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa perkembangan perusahaan multinasional atau MNCs (*Multinational Corporations*) dewasa ini, tidak bisa dilihat dari bidang ekonomi semata. Sebagai aktor yang kuat, MNCs mampu mempengaruhi bahkan dapat mengintervensi secara politis pemerintahan suatu negara yang membuat MNCs menjadi perusahaan yang berusaha meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, disisi lain MNCs juga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara tempat MNCs menanamkan investasinya. Hal tersebut dikarenakan negara maju bertindak sebagai *home country* dan *host country* sekaligus, sementara negara berkembang biasanya hanya berperan sebagai *host country* yang menyebabkan pandangan negara maju terhadap MNCs yang masuk ke negaranya menjadi lebih terbuka dibandingkan dengan negara berkembang. Pemerintah dari negara berkembang pun ingin menyelenggarakan otonomi ekonomi dan politik yang tentu saja dapat melepas mereka dari kekuatan kolonial yang dulu menguasai negara mereka. Namun, bagaimana pun juga MNCs berasal dari negara maju yang memiliki banyak keunggulan seperti modal dan teknologi, yang dimana hal tersebut dapat menguasai sektor-sektor yang penting di negara tersebut. Hal ini menyebabkan MNCs dipandang sebagai bentuk dari kolonialisme baru karena MNCs akan lebih mementingkan kepentingan aktor luar negeri daripada tujuan pembangunan negara tersebut.

A. Agen MNCs Sebagai Intelektual Organik

Intelektual organik adalah konsep yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci dalam bukunya yang berjudul *Selections from Prison Notebooks*. Buku ini ditulisnya antara tahun 1926 hingga 1935 ketika ia dipenjara oleh rezim fasis Italia akibat keterlibatannya mengikuti Partai Komunis. Di dalam bukunya tersebut terkandung beberapa pemikiran penting dari Gramsci seperti hegemoni, negara dan rakyat sipil, pendidikan dan intelektual, dan kritik terhadap materialisme. Atas pemikiran-pemikirannya itu, Gramsci sering disebut sebagai salah satu pemikir Marxisme paling penting dalam sejarah. Awalnya Gramsci mempertanyakan tentang bagaimana peran intelektual di dalam masyarakat. Bagi Gramsci semua orang pada dasarnya memiliki intelektual yang mampu berpikir secara rasional dan logis, namun tidak semua orang memanfaatkan intelektualitasnya tersebut untuk memajukan keadaan di lingkungan mereka. Menurut Gramsci, intelektual di era modern saat ini bukan hanya berbicara dan mengajarkan suatu ilmu kepada individu lain, melainkan juga turut ambil bagian dalam pembangunan hegemoni. Ia pun membagi intelektual menjadi dua jenis, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik.⁷⁰

Seperti yang ada dalam pemikiran Antonio Gramsci, intelektual organik ini menjadi unsur yang penting karena dalam konsep intelektual ini berarti hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, watak kekuasaan lahir dari sesuatu yang mirip monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa dan diperlukan perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam transisi menuju sosialisme. Gramsci menolak pandangan tradisional yang menyatakan bahwa intelektual hanya terdiri dari ahli sastra, filosof dan seniman. Intelektual bukan

⁷⁰ Antonio Gramsci, "Selections from Prison Notebooks", Lawrence & Wishart, 1971, hal 131

dicirikan oleh aktifitas berpikir intrinsik yang dimiliki oleh semua orang, namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Dengan adanya hal tersebut, Gramsci berpendapat bahwa semua orang adalah intelektual namun tidak semua memiliki fungsi intelektual tersebut. Gramsci juga menyebutkan bahwa peran intelektual organik memiliki peran yang cukup strategis. Kaum intelektual harus memberikan wawasan tentang bahasa pengetahuan dan bahasa ekspresi yang tepat agar masyarakat dapat menyampaikan hal-hal yang ia rasakan dan pikirkan. Melalui peran semacam itu masyarakat tidak akan mudah untuk langsung terjebak kedalam dogma ideologi dari kaum borjuis yang dituangkan melalui hegemoni. Hal tersebut sekaligus menjawab persoalan tentang mengapa kaum proletar tidak kunjung berhasil dalam melakukan revolusi terhadap kaum kapitalis-borjuis seperti yang diramalkan Karl Marx pada pertengahan abad ke-19. Menurut kacamata Gramsci, kegagalan utama revolusi tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam membongkar modus-modus kaum kapitalis-borjuis lewat keberadaan hegemoni yang bersifat kultural. Ditambah lagi dengan sulitnya untuk memahami apa yang mereka rasakan dari kejadian yang telah dialami.

Dalam hal ini, peran intelektual organik dalam suatu kelompok dominan sangatlah penting. Oleh sebab itu peran intelektual organik dalam sebuah MNCs juga sangat berpengaruh dalam mengorganisir berbagai kelompok lain karena dapat menjaga konsensus atau persetujuan dari berbagai kelompok untuk mendukung keberlanjutan dan keberadaan korporasi multinasional yang pada dasarnya eksploitatif. Gramsci berpendirian bahwa setiap kelas yang mempunyai kedudukan penting menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan perannya bahwa mereka bukan hanya berada dalam bidang ekonomi tetapi juga berada dalam hal politik dan sosial. Para intelektual ini dapat disebut intelektual organik jika mereka mampu menjalankan fungsi intelektualnya dalam mengorganisir

kelas lain untuk mempertahankan dominasi kelas yang berkuasa atau menciptakan konsensus dari kelas-kelas lain.⁷¹ Dengan adanya hal tersebut, perusahaan multinasional pun memiliki agennya sendiri yang berfungsi sebagai intelektual organik dalam mengorganisir hegemoni kepada masyarakat Indonesia. Para supervisor buruh pabrik lah yang dapat mengkoordinir para buruh dan mengontrol kepentingannya dan dari hal itulah mereka menanamkan nilai-nilai kepada para buruh untuk mendapatkan kepentingan produksi perusahaan. Peran intelektual bagi konsumen MNCs ini dijalankan oleh bagian persuasif guna menyebarkan budaya-budaya baru untuk membentuk suatu nilai yang menjadikan konsumen tertarik pada produk MNCs itu sendiri. Agen-agen intelektual yang dibentuk oleh MNCs ini juga akan membangun suatu opini positif dari masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya. Mulai dari dukungan masyarakat dengan ditunjuknya beberapa *foundation* dan program yang diklaim oleh MNCs sebagai program pertanggungjawaban sosial dari perusahaan terhadap masyarakat di wilayah sekitar tempat beroperasinya MNCs. Seperti perusahaan Nike yang membentuk ajang pencarian bakat pemain sepakbola yaitu Beasiswa Nike Academy yang didukung oleh Liga Premier Inggris. Dari Indonesia akan dipilih 1 pemain yang lolos seleksi dan akan bergabung dengan 99 pemain dari 40 negara yang nantinya akan dilatih oleh Arsene Wenger, manajer dari Arsenal FC.⁷² Adapun usaha lain juga seperti yang dilakukan oleh PT. Nikomas Gemilang yang merupakan salah satu pabrik Nike di Indonesia yang melakukan pelatihan hak buruh perempuan dan perlindungan maternitas. Yang dimana pelatihan ini menjadi hal yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat mengerti dan mengetahui hak-hak pekerja

⁷¹ *Ibid* hal 135

⁷² <https://www.antarafoto.com/olahraga/v1284895201/beasiswa-nike-academy>. diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.05

perempuan. Dengan adanya hal tersebut, secara tidak langsung dilakukan penanaman citra baik perusahaan bahwa mereka peduli akan hak-hak para pekerja, terutama kaum wanita.⁷³

B. Objek Hegemoni MNCs Di Indonesia

Buruh merupakan tenaga kerja yang bekerja pada sebuah perusahaan, dimana para tenaga kerja ini harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang dibentuk oleh perusahaan yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, yang nantinya buruh-buruh ini akan memperoleh upah serta jaminan hidup yang wajar. Berbicara mengenai buruh maka tidak terlepas dari hubungan industri, eksploitasi, serta gerakan buruh itu sendiri. Secara historis, kondisi buruh di dunia terutama yang ada di Indonesia tergolong dalam kondisi yang tidak menguntungkan karena didasari hubungan kerja yang banyak tidak berpihak kepada buruh itu sendiri. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan dari segi ekonomi, psikologi, maupun sosialnya, banyak buruh yang hidup dalam kondisi ekonomi kebawah karena penghasilan mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Disisi lain, hak-hak buruh pun seperti hak libur, hak melahirkan atau hak lainnya akan menimbulkan masalah psikologis. Bahkan terkadang buruh tidak dapat berserikat dan tidak dapat mengeluarkan pendapatnya demi menuntut kepentingan dan hak-hak mereka karena dibatasi oleh perusahaan padahal hak mereka sudah diatur dalam Undang Undang Nomer 13 Tahun 2003.

Buruh-buruh tersebut terjebak di dalam konflik kekuasaan yang di dalamnya ada pertarungan kelas. Dimana pertarungan ini merupakan pertarungan antara dunia kapitalis yang berusaha menumpuk modal dengan

⁷³ <http://www.spnkomplainmedia.com/2017/10/bidang-pppa-spn-pt-nikomas-gemilang.html> Diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.45

menjadikan buruh sebagai kaum yang tertindas. Dengan dibentuknya persetujuan kepada masyarakat atas nilai-nilai masyarakat yang dominan kemudian dilakukan penguasaan kemampuan kritis, basis-basis pikiran, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi. Dari adanya hal tersebut, terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa. John Storey menjelaskan konsep hegemoni yang mengacu kepada proses yaitu sebagai berikut :

“...sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar, di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.”

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh John Storey ini bahwa hegemoni terjadi di dalam masyarakat apabila masyarakat tingkat atas memiliki kemampuan untuk memimpin. Ketika memiliki kemampuan tersebut, masyarakat tingkat bawah pun hanya tunduk dan mau menerima serta menuruti apa saja yang akan dikatakan, diperlakukan oleh pemimpinnya yang pada akhirnya hal tersebut akan membentuk suatu lingkaran kekuasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, setelah Nike mendapat dukungan dari negara, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan para buruhnya Nike yang merupakan MNCs (kelas dominan) ini melakukan penguasaan kepada kaum buruh (kelas bawah)

menggunakan ideologi. Yang dimana Nike membentuk kesadaran kaum buruh melalui pelatihan-pelatihan agar para buruh dapat mengerti dan mengetahui hak-haknya dan secara tidak langsung hal itu akan menanamkan bahwa Nike peduli akan hak-hak para buruhnya. Pengendalian Nike terhadap kaum buruhnya pun sejalan dengan kolaborasi yang dilakukan Indonesia dan MNCs. Kaum buruh ini pun menjadi kelompok yang didominasi. Seiring dengan berjalannya hegemoni itu sendiri, suatu kelompok akan selalu didukung dengan nilai dan norma. Ketika semua hal berjalan baik, dari hegemoni yang dilakukan dan diikuti dengan nilai serta norma yang diberikan, maka output dari hal tersebut adalah keuntungan sebesar-besarnya yang akan didapatkan oleh Nike itu sendiri.

C. Tahapan Proses Hegemoni Antara MNCs Dan Negara Terhadap Kaum Buruh

Menurut Gramsci ada tiga tingkatan hegemoni yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum.⁷⁴ Hegemoni yang minim merupakan suatu bentuk dari hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk yang lainnya. Karena hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara kaum elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung secara bersamaan dengan keengganan campur tangan massa dalam urusan bernegara. Hal itu dapat terjadi karena kelompok-kelompok hegemonis ini tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Apa yang mereka inginkan yaitu mempertahankan sebuah peraturan yang diciptakan untuk diikuti oleh objek hegemoni melalui transformasi dari para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi secara bersamaan yang berpotensi untuk bertentangan dengan negara yang dicita-citakan oleh

⁷⁴ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam diskursus kemasyarakatan dan kemanusiaan", Jakarta: Gramedia, 1993, hal 82-84

kelompok hegemonis itu. Bahkan menurut Gramsci, hegemoni ini tidak akan tercapai oleh tindakan-tindakan korporasi ekonomi yang sempit dari orang-orang yang berkuasa pada sistem tersebut karena kepemimpinan hegemoni pun harus mencakup tindakan-tindakan yang mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa.⁷⁵

Namun bagi Gramsci, apapun dan bagaimanapun kelas kelompok sosial mereka harus melalui berbagai tahapan sebelum mereka dapat dikatakan hegemonik. Adapun tiga tingkat perkembangan politik menurut Gramsci yang harus dilalui suatu kelompok sosial agar dapat mengembangkan gerakan yang dapat memulai perubahan yaitu tahap pertama merupakan perkembangan kelompok yang disebut korporat-ekonomis. Korporatis disini merujuk pada pemaknaan seseorang yang mengutamakan kepentingan individu. Seseorang yang telah memiliki prinsip bahwa harus untuk berafiliasi dengan tahap korporat-ekonomis sebagai fungsi dari kepentingan pribadinya akan menyadari bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri agar tujuan mereka tetap masih bisa dilanjutkan.

Di tahap yang kedua, anggota-anggota kelompok ini mulai menyadari bahwa terdapat wilayah kepentingan yang lebih luas. Terdapat pihak lain yang berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa depan yang telah diperhitungkan dengan seksama. Di tahap inilah rasa solidaritas berkembang, tetapi solidaritas ini hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama dan tidak ada pandangan dunia bersama. Ditahapan ketiga, hegemoni dapat dikatakan bisa diwujudkan setelah mencapai tahapan ini karena anggota kelompok sosial mulai menyadari

⁷⁵ *Ibid* hal 20

kepentingan dan kebutuhan yang mereka lakukan dalam konteks kelas-kelas mereka tersendiri. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok tersebut menjadikan sebuah agenda kepentingan kelompok menjadi agenda milik bersama dan melekat menjadi satu dengan kepentingan anggota secara internal beserta kelompok lain secara eksternal sehingga perjuangan menjadi lebih massif menjadi nilai penting di dalam hal ini.⁷⁶

Berdasarkan pemahaman yang dipaparkan oleh Gramsci, antara MNCs dengan pemerintah Indonesia telah menjalankan tahapan untuk menjadi hegemoni. Nike Inc, yang bersifat korporat-ekonomi mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri dan tentunya membutuhkan dukungan atau telah berafiliasi dengan Indonesia untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. Nike Inc pun harus menyadari bahwa hal ini bukan sekedar bisnis melainkan harus terus membagi kepentingannya untuk masa depan Indonesia. Namun pada prosesnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya jembatan antara kedua belah pihak untuk mendominasi kaum buruh.

Oleh karena itu, menurut Gramsci berjalannya suatu hegemoni tidak hanya bisa dilakukan oleh negara yang selama ini dikenal sebagai *Ruling Class* melainkan bisa dilakukan oleh seluruh kelas sosial. Hegemoni itu sendiri adalah suatu bentuk dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang dimiliki oleh aktor hegemoni dapat didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan bersifat moral, intelektual serta budaya⁷⁷ Dominasi inilah yang menjadi awal hegemoni, jika sudah melalui tahapan dominasi maka tahap berikutnya

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Dominic Srinati, "An Introduction to Theories of Popular Culture", Routledge, 2004

yaitu diarahkan dan tunduk pada kepemimpinan oleh kelompok yang mendominasi.

Gramsci pun membedakan dua tipe intelektual yang ada dalam masyarakat. Pertama yaitu intelektual tradisional, yang dimana intelektual ini terlihat independen, otonom, serta menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Intelektual ini lebih bergerak secara sendiri atau dapat dikatakan dengan ruang lingkungannya yang sempit. Contohnya adalah para penulis sejarah, filsuf dan para profesor. Sedangkan yang kedua yaitu intelektual organik, mereka inilah yang sebenarnya menanamkan suatu ide atau menjadi jembatan untuk melakukan penyebaran ide, nilai atau suatu paham yang ada di masyarakat dari kelas yang berkuasa, serta turut aktif dalam membentuk masyarakat yang diinginkan. Kaum intelektual yang dimaksud oleh Gramsci dibentuk tidak hanya untuk memahami struktur produksi namun mampu untuk paham dalam bidang sosial dan politik. Para pengusaha kapitalis akan menciptakan beberapa pihak untuk berada disampingnya yang ahli di dalam bidang ekonomi politik, memahami perubahan budaya dan juga sistem yang legal. Yang perlu ditegaskan bahwa pengusaha tersebut merepresentasikan level tertinggi dari elaborasi sosial. Hal tersebut dilakukan agar kapasitas MNCs menjadi lebih luas meskipun tetap fokus ke dalam produksi ekonomi. Dengan adanya hal tersebut, MNCs dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap bisnisnya dan konsumen terhadap produknya.⁷⁸

Disini MNCs tidak selalu merekrut kaum elit tetapi juga merekrut kaum non elit, di dalam prosesnya kaum elit lebih memahami lingkup dan bidangnya karena merekalah yang menjadi kepercayaan investor dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan untul kaum non elit lebih memahami berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat pada

⁷⁸ Antonio Gramsci, "Selection from Prison Notebooks: The Intellectuals", Lawrence & Wishart, 1971, hal 134-135

daerahnya, seperti aspek demografi, nilai-nilai yang dianut, norma yang dijalankan bahkan sampai kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Penduduk yang telah terbiasa tinggal di lokasi tersebut yang nantinya akan dijadikan objek hegemoni. Dalam kasus yang sering ditemui adalah pada saat investor ingin membuat sebuah usaha di suatu lokasi yang baru, maka yang akan di rekrut untuk menjadi pendamping dalam pengembangan bisnis adalah beberapa penduduk setempat. Sehingga para perusahaan tersebut dapat lebih mudah dan cepat untuk memahami karakteristik lokasi tempat mereka melakukan produksi ekonomi. Kaum intelektual tersebut yang akan menjadi jembatan antara perusahaan dan negara dalam kolaborasinya untuk menjalankan sebuah bisnis. Pada proses pelaksanaan kolaborasi tersebut kaum intelektual akan menjadi motor untuk melaksanakan kegiatan operasional agar bisnis dapat berjalan dengan lebih mudah. Kaum intelektual organik ini mempunyai suatu keharusan yaitu berani berangkat dari kenyataan yang ada di masyarakat dan mereka harus menjadi orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat serta menanamkan kesadaran menyingkap kebobrokan sistem lama dan dapat mengorganisir masyarakat.⁷⁹

Pada fokus pembahasan tentang bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Negara dan Nike terhadap bisnisnya untuk dapat mengendalikan kaum buruh pabrik, maka terdapat proses hegemoni yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Buruh disini dijadikan objek dikarenakan hegemoni tersebut dilakukan ketika adanya sebuah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya dengan atau tanpa ancaman, sehingga ide-ide dapat dengan mudah untuk diterima oleh kaum yang didominasi. Dalam proses hegemoni yang dilakukan, ada beberapa poin penting yang dianggap ketika sudah dapat diterima oleh kaum yang didominasi dalam hal ini adalah buruh secara

⁷⁹ *Ibid* hal 135

tidak sadar, maka hegemoni telah berhasil dilakukan. Beberapa poin tersebut diantaranya :

1. Norma
2. Nilai
3. Impulsif
4. Tekanan
5. Peraturan dan Hukuman

Dari beberapa poin diatas sampai saat ini sudah dianggap berhasil untuk menciptakan hegemoni terhadap kaum buruh. Poin diatas akan dijelaskan secara lebih detail agar dapat memahami tahapan proses kolaborasi antara Nike dan Indonesia untuk menciptakan hegemoni terhadap kaum buruh.

Pertama yaitu norma, yang merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima di masyarakat. Apabila suatu norma telah disepakati bersama untuk dijalankan, maka akan lebih mudah untuk menyatukan kerangka pemikiran dari para kaum buruh untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kedua yaitu nilai, yang merupakan hal-hal penting yang berguna bagi kemanusiaan. Hal tersebut harus tetapi diperhatikan dalam mendirikan perusahaan. Nilai kemanusiaan harus menjadi sorotan utama sebuah perusahaan untuk melindungi para buruhnya agar tetap bekerja tanpa adanya perlawanan atau tuntutan akan haknya sebagai manusia. Hal tersebut biasanya diaplikasikan kedalam sebuah pelatihan kepada para buruh di suatu perusahaan. Seperti perusahaan Nikomas yang telah dipercaya oleh Nike untuk membuka pabriknya disini. Untuk melindungi para buruhnya terhadap tingkat kepercayaan kepada perusahaan tempat mereka bekerja, PT Nikomas Gemilang dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan kolaborasi untuk melakukan pelatihan hak buruh perempuan dan perlindungan maternitas. Yang dimana pelatihan ini menjadi hal yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat mengerti dan mengetahui hak-hak pekerja perempuan. Dengan adanya hal tersebut, secara tidak langsung dilakukan penanaman citra baik perusahaan bahwa mereka peduli akan hak-hak para pekerja, terutama hak pekerja kaum wanita.

Ketiga yaitu impulsif, yang berarti menunjukkan bahwa seorang individu cepat dalam bertindak dan tergerak hatinya secara tiba-tiba. Seperti yang dilakukan oleh para buruh yang melamar pekerjaan di pabrik Nike yang bernama PT. Nikomas yang telah diberi izin kerja oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan produksi di daerah Serang, Banten. Perusahaan tersebut lebih menyukai buruh pendatang daripada buruh yang berasal dari kawasan tersebut. Secara tidak langsung, para buruh pendatang sangat impulsif untuk merespon peluang kerja di pabrik tersebut yang sebenarnya daerah asal mereka pasti memiliki peluang pekerjaan, akan tetapi para buruh tersebut tetap memilih perusahaan Nike.

Keempat yaitu tekanan, yang merupakan suatu desakan atau paksaan yang mengakibatkan tertindas. Dalam hal ini para buruh Nike dipaksa bekerja satu jam ekstra setiap hari, enam hari seminggu tanpa dibayar. Mereka dipaksa untuk lembur untuk memproduksi barang. Bahkan para buruh yang berada di salah satu pabrik Nike di Sukabumi, Jawa Barat dipaksa menanda tangani petisi yang mendukung klaim pabrik bahwa pabrik tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar tingkat upah minimum oleh salah satu anggota militer yang disewa oleh perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, para buruh pada kenyataannya mendapatkan tekanan yang keras dari perusahaan.

Kelima yaitu, peraturan dan hukuman yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Peraturan diciptakan untuk membuat buruh patuh terhadap aturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Apabila peraturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya para buruh akan mendapatkan sebuah hukuman dari tempat perusahaan mereka bernaung, dalam kasus ini yaitu Nike. Pada peraturan yang ditetapkan oleh Nike terkait dengan pemberian upah atau gaji setiap bulannya kepada buruh, Nike hanya membayar para buruh yang dipekerjakannya dengan jumlah buruh yang sangat besar dengan nominal 30 pence/jam. Jika 100 pence setara dengan 1 pounds mata uang Inggris, artinya buruh yang bekerja selama ini hanya dibayar Rp5.642 per jam. Jika buruh tersebut bekerja selama 8jam sehari, dan masuk kerja selama lima hari dalam seminggu, mereka hanya mengantongi gaji sebesar Rp1,26 juta tiap bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji tersebut diberlakukan oleh Nike disebabkan Upah tersebut ditetapkan oleh Nike seiring dengan upah minimal regional (UMR) yang ditetapkan oleh otoritas berwenang di Indonesia. Meski demikian, uang tersebut tidak cukup untuk makan dan membeli pakaian keluarga mereka. Para buruh pun kebanyakan hanya diam dan mengikuti aturan yang diberlakukan, karena takut diberi hukuman oleh Nike jika melakukan perlawanan.⁸⁰

Apabila kelima poin tersebut telah berhasil untuk diterapkan kepada kaum buruh Nike, maka objek hegemoni telah berhasil dikendalikan. Usaha diatas tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dari kedua belah pihak, yang dalam hal ini Nike dan Pemerintah Indonesia.

80

<https://economy.okezone.com/read/2014/04/07/320/966591/upah-pemerintah-indonesia> diakses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 19.15

Pada tahapan proses hegemoni inilah dapat dipahami bahwa untuk melakukan sebuah hegemoni haruslah mencakup sebuah variabel penting. Maka dapat dikatakan Nike dan pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan sebuah hegemoni.